

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengujian Undang-undang merupakan suatu wewenang untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan tersebut isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.¹

di Indonesia sendiri pengujian atas Peraturan Perundang-undangan dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi menguji Undang-undang atas Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang seperti yang telah diatur dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang dimana menyatakan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang.²

¹ H. Machmud Aziz, *Jurnal Mahkamah Konstitusi Volume 7*, Nomor 6, Desember 2010, Hlm.127

² Lihat Pasal 31 Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985

Pada tanggal 27 Februari 2020, Mahkamah Agung mengeluarkan Keputusan yang membatalkan Pasal 34 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dengan beberapa pertimbangan. Yang dimana dalam putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan bahwa Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.³

Dalam perkara ini Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) selaku pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung untuk dapat menguji kembali Materi Muatan dalam Pasal 34 ayat (1) dan Ayat (2) peraturan Presiden nomor 75 tahun 2019 tersebut dikarenakan menurut pemohon Peraturan Presiden tersebut memberatkan pemohon dengan alasan bahwa Jaminan Sosial yang diantaranya mencakup Hak Asasi Manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita pendirian Republik Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 serta Peraturan tersebut dirasa tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengisyaratkan bahwa setiap individu, keluarga, dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan kesehatan dan Negara

³ Lihat, Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/HUM/2020.

bertanggung jawab memastikan terpenuhinya hak hidup sehat bagi penduduknya, termasuk bagi masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu, sementara dari pihak pemohon yang dimana notabene terdapat berbagai macam latar belakang ekonomi merasa terbebani dengan peraturan presiden tersebut.

Prinsip pedoman hak atas kesehatan mensyaratkan setidaknya harus mempertimbangkan, pertama, ketersediaan layanan kesehatan. Negara harus memiliki sejumlah layanan kesehatan yang mencukupi bagi penduduk secara keseluruhan. Kedua, layanan kesehatan yang mudah diakses baik dari segi keuangan, geografis dan budaya. Aksesibilitas keuangan masyarakat agar layanan kesehatan harus terjangkau ada pengaturan biaya layanan kesehatan bagi mereka yang tidak mampu membayar perawatan yang diperlukan, lalu aksesibilitas geografis mensyaratkan bahwa layanan kesehatan berada dalam jangkauan setiap orang dan aksesibilitas budaya mengharuskan layanan kesehatan menghormati budaya manusia. Namun pada faktanya, kewajiban negara untuk menjamin kesehatan warganegaranya sebagaimana diamanatkan undang-undang ternyata telah beralih menjadi kewajiban warga negara guna menjamin kesehatannya sendiri dan kesehatan warga negara lainnya yang ditanggung secara gotong royong. Dipertegas dalam serangkaian peraturan jaminan kesehatan nasional (JKN) bahwa jaminan kesehatan yang seharusnya menjadi hak warga negara telah berubah menjadi kewajiban warga negara kepada negara, dengan membayar iuran

kepesertaan yang nilainya ditentukan secara sepihak oleh pemerintah tanpa memperhatikan kemampuan warganya. Pembayaran iuran BPJS oleh peserta mandiri menjadi seperti membayar kewajiban “Pajak”, dimana bila warga negara tidak mampu akan dikenakan denda dan sanksi lainnya akibat ketidakmampuannya membayar iuran kepesertaan tersebut. Menurut pemohon hal tersebut membuktikan bahwa dengan keluarnya Peraturan Presiden nomor 75 Tahun 2019 yang dimana Kebijakan Pemerintah menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan sebesar 100% ditahun 2020 tanpa dasar yang jelas dan perhitungan logis, selain hanya untuk menutup kerugian yang terjadi akibat kesalahan dan kelalaian dalam tata penyelenggaraan BPJS, sehingga rakyat yang harus terbebani kembali seperti masyarakat kelas bawah dan menengah yang justru masih memiliki daya beli rendah.⁴

Seperti yang dapat diketahui bahwa Peraturan Presiden adalah salah satu Instrumen hukum dibawah undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan dirasa tepat apabila permohonan pengujian Peraturan Presiden ini diajukan kepada Mahkamah Agung seperti yang tertuang dalam Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung maka dirasa telah

⁴ Lihat, Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/HUM/2020.

memenuhi kompetensi Absoult Mahkamah Agung (*Attributie Van Rechtsmacht*).

Menurut Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Secara hierarki, Peraturan Presiden adalah Peraturan dibawah Peraturan Pemerintah.⁵ Merujuk kepada hal tersebut, maka secara materi pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial haruslah merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 sebagai bentuk dari proses penjalanan kekuasaan pemerintah. BPJS adalah badan yang lahir atas Undang-undang. Artinya, bentuk pelaksanaan dari BPJS termasuk dalam tanggung jawab eksekutif.

Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan program jaminan sosial kesehatan masyarakat merupakan suatu pemberian pengharapan yang sangat besar kepada masyarakat namun jika memperhatikan konsideran faktual pada peraturan presiden nomor 75 tahun 2019 ternyata tidak mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar kenaikan iuran BPJS, maka hakim dengan sikap kehati-hatian dan kebijaksanaan dalam mengadili Permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan pemohon.

⁵ *Ibid.*

Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, hakim memutuskan bahwa mengabulkan sebagian permohonan keberatan hak uji materiil dari pemohon dan menyatakan bahwa pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 75 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu pasal 2 Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, serta menyatakan bahwa Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁶

Dalam memutus perkara tersebut, tentu Majelis Hakim di tingkatan Mahkamah Agung memiliki pertimbangan-pertimbangan yang dimana pertimbangan tersebut meliputi aspek yuridis, Sosiologis, dan aspek Filosofis. Dalam hal ini penulis ingin lebih menitik beratkan kepenulisan ini terhadap aspek yuridis yang dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkara Nomor 7P/HUM/2020 tentang Iuran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta menganalisa dan meninjau putusan Mahkamah Agung tersebut.

⁶ Putusan Mahkamah Agung No.7P/HUM/2020

Secara konstitusional, Sistem jaminan Sosial Nasional dan BPJS dijabarkan secara operasional pada Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2019 sebagai perubahan atas peraturan presiden sebelumnya yang pada pokoknya mengatur tentang pemberian jaminan hak atas pelayanan kesehatan dan hak atas jaminan sosial. Perundang-undangan tersebut merupakan derivasi dari ketentuan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 28H ayat (1) dan Ayat (3), serta Pasal 34 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.⁷

Jaminan kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia. Oleh karenanya, Negara menetapkan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan pemberian suatu pengharapan yang sangat besar bagi masyarakat yang tentu sudah dipertimbangkan dari segala aspek penganggarnya. Oleh karena itu, kenaikan BPJS yang telah mengecewakan masyarakat pada umumnya dapat dinilai bertentangan dengan asas pengharapan yang layak, yaitu pemerintah harus bertanggung jawab sepenuhnya untuk mewujudkan harapan yang sudah diberikan kepada masyarakat menjadi kenyataan.

⁷ *Ibid.*

Wewenang Mahkamah Agung dalam memutus perkara ini terdapat dalam ketentuan Pasal 24A Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 20 Ayat (2) huruf b Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 31 Ayat (1) Undang-undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Putusan dari Mahkamah Agung memiliki Implikasi Hukum yang harus dipatuhi oleh setiap subjek hukum yang bersangkutan dengan pokok putusan.⁸

Dalam Pasal 20 Ayat (2) huruf b Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menyatakan Mahkamah Agung berwenang menguji Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-undang. Selanjutnya pada Pasal 9 Ayat (2) Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan, daalam hl suatu peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-undang pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ketentuan hak menguji oleh Mahkamah Agung sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang dimana dalam Pasal 26 menyatakan, bahwa:

- (1) Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-

⁸ Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

(2) Putusan tentang tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubungan dengan pemeriksaan ditingkat kasasi.⁹

Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 yang menganulir pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan menimbulkan kebingungan baik dari sisi pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan jaminan kesehatan maupun dari masyarakat yang melakukan pembayaran iuran jaminan kesehatan tersebut. BPJS Kesehatan menyatakan belum membatalkan kenaikan iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat dengan dalih menunggu pemerintah mengubah ketentuan Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2009 atau keputusan Mahkamah Agung berlaku 91 hari.¹⁰

Menarik bagi penulis untuk dapat mengkaji dan menganalisa posisi kasus tersebut lebih dalam, maka dari itu penulis ingin menganalisa dengan judul **“ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7P/HUM/2020 TENTANG UJI MATERI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG IURAN**

⁹ Pasal 26 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

¹⁰ www.hukumonline.com, Mochamad Januar Rizki, *Penjelasan Hukum soal Polemik iuran BPJS Kesehatan pasca Putusan MA*, diunggah pada tanggal 7 April 2020

**JAMINAN KESEHATAN NASIONAL-KARTU INDONESIA
SEHAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM”.**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas penulis memfokuskan pembahasan masalah kedalam 3 (tiga) Rumusan Masalah untuk menghindari melebarnya pembahasan dalam penelitian yang penulis lakukan, adapun 3 (tiga) Rumusan Masalah tersebut sebagaimana berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 tentang Uji Materi Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 tentang Iuran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat atas undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial?
2. Bagaimana Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 tentang Uji Materi Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 tentang Iuran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat atas undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ditinjau dari aspek kepastian hukum?
3. Apa implikasi hukum atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 tentang Uji Materi Peraturan Presiden Nomor 75 tahun

2019 tentang Iuran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat
atas Undang-undang Nomor 24 tahun 2011?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang sebagaimana penulis kemukakan
diatas, maka penulisan penelitian hukum ini adalah:

1. Mengetahui dan Mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 tentang Uji Materi Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 tentang Iuran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat atas undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
2. Mengetahui dan Mengkaji Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 tentang Uji Materi Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 tentang Iuran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat atas undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial jika ditinjau dari aspek kepastian hukum;
3. Mengetahui dan Mengkaji implikasi hukum atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 tentang Uji Materi Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 tentang Iuran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat atas Undang-undang Nomor 24 tahun 2011.

D. Manfaat Penulisan

Beranjak dari tujuan yang telah penulis rumuskan sebagaimana diatas, maka penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait sebagaimana berikut:

1. Bagi Penulis:

Penelitian ini penulis harapkan dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi dari segi keintelektualan dalam disiplin Ilmu Hukum terkhusus di konsentrasi ketatanegaraan sekaligus menambah khazanah keilmuan terkait permasalahan-permasalahan yang telah penulis angkat sebagai tema besar penelitian hukum ini. Selain hal tersebut, penelitian ini digunakan sebagai syarat untuk penulisan tugas akhir dalam menyelesaikan studi strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Tak lupa penulis berharap penelitian ilmiah ini dapat dijadikan referensi/bahan bagi penelitian lanjutan yang sejenis dengan apa yang telah penulis sampaikan.¹¹

2. Bagi Pemerintah:

Penelitian ini penulis harapkan dapat menjadi referensi kritis yang dapat digunakan oleh segala elemen pemerintahan yang berkaitan dengan Jaminan Kesehatan dan Sosial dalam menjalankan putusan Mahkamah Agung sehingga dapat mencapai tujuan hukum yang mengedepankan kepastian hukum ketimbang kepastian prosedural.

3. Bagi Masyarakat:

¹¹ Muslan Abdulrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang:2009, hlm.102

Penelitian ini penulis harapkan dapat menjadi referensi yang dapat menambah pemahaman dalam bidang Hukum Tata Negara, sehingga Masyarakat dapat memahami tugas dari Pemerintah pada umumnya dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada khususnya, selain itu penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan bagi masyarakat luas untuk memberi kritik yang objektif dan masyarakat dapat kritis secara proporsional kepada Pemerintahan.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasar pada tujuan yang telah penulis paparkan sebagaimana diatas maka penulis harapkan penelitian ini memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:

Memperdalam serta mengembangkan Ilmu Hukum secara umum dan pada Hukum Tata Negara khususnya peran Lembaga Negara dalam hal ini adalah Pemerintahan yang berkaitan dengan Jaminan Kesehatan dan Sosial yang bertindak sebagai eksekutorial dari peraturan perundang-undangan serta Mahkamah Agung yang bertindak sebagai Penguji Peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang (*Judicial Review*). Sehingga pembaca penulisan ini mendapatkan pencerahan yang valid melalui *Legal Research* ini.

2. Secara Praktis:

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pembaca dan/atau pencari keadilan dan kepastian yang sedang menjadi Peserta Jaminan Kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini juga dibuat oleh penulis untuk memenuhi Tugas Akhir dan mendapatkan gelar Sarjana.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum.¹² Suatu perencanaan penelitian merupakan pedoman untuk mengumpulkan data, mengolahnya, untuk kemudian dianalisa dan dikonstruksikan.¹³ Dalam menentukan penelitian hukum tentu ada beberapa pendekatan yang digunakan. Dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bagian, berawal dari Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis dan Sumber Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum sampai Teknik Analisa Bahan Hukum, yang dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Berdasarkan Jenis penelitian yang ada, maka penulis menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif yang dimaknai dengan suatu

¹² F. Sugeng Sanyoso, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta: 2007, Hlm. 29

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, UI Press Cet. 3, Jakarta: 1986 Hlm.164.

Prosedur Ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi Normanya.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian merupakan cara yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang coba dipecahkan maupun dicari jawabannya. Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Pendekatan Putusan Peradilan (*Sentence Approach*), digunakan sebagai landasan dalam mengkaji pokok permasalahan yang diajukan serta dapat mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara terkait;
- b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), digunakan sebagai pijakan dalam menelaah isu hukum yang sedang dihadapi, dan juga dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum. Tentu juga dalam penelitian ini perlu menelaah dasar ontologis Peraturan Presiden, landasan filosofinya dan *Ratio legis* Peraturan Presiden tersebut.

3. Jenis dan Sumber Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang dijabarkan satu persatu seperti dibawah ini:

- a. Bahan Hukum Primer yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas atau bersifat otoritatif.¹⁵ Peraturan Perundang-undangan

¹⁴ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang: 2012, Hlm. 57.

yang dijadikan bahan hukum primer oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 4. Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 5. Peraturan presiden Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
 6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/HUM/2020.
- b. Bahan Hukum Sekunder yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai Bahan Hukum Primer,¹⁶ antara lain:
1. Buku-buku Literatur Hukum;
 2. Disertasi, Tesis atau Laporan Penelitian;
 3. Jurnal;
 4. Naskah Akademik Undang-undang.

¹⁵ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1995, Hlm. 14-15

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002, Hlm.116

c. Bahan Hukum Tersier Yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan Hukum Primer dan Tersier,¹⁷ yaitu berupa:

1. Kamus Hukum;
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan
3. Encylopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis dalam penelitian ini melakukan pengumpulan bahan hukum dengan cara Studi kepustakaan (*Library Research*). Dengan cara mengumpulkan dan mencari bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini, yang kemudian menyusun, memetakan serta membaca bahan-bahan tersebut kedalam suatu kerangka metodelis yang padu.

Tidak hanya bahan Hukum Primer, bahan Hukum Sekunder juga dikumpulkan dengan melakukan Studi Kepustakaan dengan cara penelusuran melalui Internet. Penulis dalam hal ini membaca buku-buku yang dapat dijadikan literatur, Jurnal-jurnal Hukum yang relevan, Tesis dan Juga Disertasi-disertasi Hukum.

5. Analisa Bahan Hukum

Analisa adalah kegiatan dalam penelitian yang melakukan kajian atau tela'ah terhadap hasil pengolahan bahan hukum dengan memberikan pemaknaan beserta penafsiran dengan dibantu dengan

¹⁷ *Ibid.*

teori-teori yang telah diuraikan sebelumnya.¹⁸ Untuk menganalisa bahan hukum dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Analitis.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan mempermudah pemahaman mengenai penulisan hukum ini, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis memaparkan mengenai Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan lebih dalam dan sistematis mengenai teori-teori yang berhubungan dengan objek penelitian. Yaitu lebih banyak menggunakan penjelasan terkait kajian Putusan Mahkamah Agung serta kajian-kajian mengenai implikasi putusan Mahkamah Agung terhadap Pemerintah termasuk Badan Penyelenggara

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empirisme*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2009, Hlm.183.

Jaminan Sosial dan mengkaji lebih komprehensif mengenai teori tujuan hukum, teori tentang *Legal Effect* Pasca Putusan Mahkamah Agung, dan teori Negara Kesejahteraan yang menjamin Jaminan kesehatan bagi masyarakat. Dengan adanya kajian pustaka ini maka akan memperluas perspektif penulis dalam menganalisa suatu putusan.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini penulis menguraikan tentang pembahasan yakni hasil analisa penulis dengan menggunakan pisau analisa yangtelah dipaparkan dengan membaginya kedalam sub bab yang masing-masing berkaitan dengan permasalahan, Apa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 tentang Uji Materi Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 tentang Iuran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat atas undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Bagaimana Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 tentang Uji Materi Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 tentang Iuran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat atas undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial jika ditinjau dari aspek kepastian hukum.

Apa implikasi hukum atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 tentang Uji Materi Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 tentang Iuran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat atas Undang-undang Nomor 24 tahun 2011

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini penulis menyajikan tentang kesimpulan akhir dari penelitian yang diperoleh dan memuat saran yang berkaitan dengan permasalahan sebagaimana telah penulis paparkan dari hasil penelitian, guna perbaikan hukum kedepan kearah yang lebih baik.